



N EWS ANALYSIS | **TEGUH YUWONO**
ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK UNDIP



DOK

Harus Dibarengi dengan Anggaran

PENINGKATAN gaji guru honorer setara UMK itu harus ya. Itu sebuah tugas yang sangat mulia, seorang guru diangkat secara UMK.

Karena dia berkontribusi terhadap pembukaan Un-

dang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan bernegara itu mencerdaskan kehidupan bangsa.

■ KE HALAMAN 17

Harus Dibarengi...

■ DARI HALAMAN 9

Menurut saya terlambat sih sebetulnya. Mestinya sudah 5-10 tahun yang lalu, standar guru honorer setara UMK. Kalau sekarang terima Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu opo yo iso urip? Saya setuju itu pemikiran pak Gubernur.

Sekarang yang jadi masalah begini, apakah tersedia anggaran dan dukungan dana untuk didorong pada kebijakan publik? Saya kira begini, bupati wali kota harus mendorong supaya keinginan gubernur ini bisa di-

eksekusi.

Atau begini, kembalikan saja ke gubernur. Agar gubernur juga membantu sepe-ruhnya.

Misalnya anggaran APBD provinsi yang kira-kira boros dan tidak relevan gitu bisa direalokasikan untuk guru-guru itu.

Jadi mestinya gubernur juga bisa bantu daerah yang tidak mampu secara anggaran. Supaya ide-ide itu berjalan. Mana yang perlu dibantu anggaran provinsi, mana yang harus didorong oleh

anggaran kabupaten kota.

Sebab, kalau hanya imbauan-imbauan, bupati-wali kota pasti bilang tidak ada anggarannya. Misalnya, provinsi memberi bantuan atau alokasi provinsi yang untuk SDM itu bisa dialokasikan bayar guru-guru itu.

Sekalipun guru-guru itu kewenangan kabupaten kota, tetapi gubernur kan tidak apa-apa membantu. Misalnya 50 persen atau 40 persen.

Kasihan honorer, susah sekali hidupnya. Mungkin tiap mereka mengajar sambil mrenget. (dna)